

Kesiapan Pelaporan Keberlanjutan Pemerintah Daerah: Kepatuhan Standar Gri di Bantul dan Sleman (*Local Government Sustainability Reporting Readiness: Gri Standard Compliance in Bantul and Sleman*)

Zulfatun Ruscitasari^{1*}, Mamluatul Marzuqoh², Galuh Ratna Mutia³

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Yogyakarta^{1,2}, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Nusa Tenggara Barat³

zzulfatunr@unu-jogja.ac.id^{1*}, mamluatul.marzuqoh.akt21@student.unu-jogja.ac.id², galuhratnamutia@gmail.com³



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 Januari 2025
Revisi 1 pada 3 Februari 2025
Revisi 2 pada 17 Februari 2025
Revisi 3 pada 27 Februari 2025
Disetujui pada 28 Februari 2025

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the readiness of sustainability reporting in the regional governments of Bantul and Sleman by measuring their level of compliance with the Global Reporting Initiative (GRI) standards, particularly the GRI 200 (economic) and GRI 300 (environmental) standards. The assessment is conducted by measuring the percentage of alignment between the information presented by the regional governments on their respective websites and the information required by the GRI indicator standards.

Research methodology: This study uses secondary data in the form of public information available on the websites of the Bantul and Sleman Regional Governments.

Results: The research results show significant efforts in revealing economic and environmental performance. However, there are still shortcomings in the completeness and clarity of information. Some GRI indicators, such as GRI 202, 204, 205, 206, 301, 304, and 305, have not been fully disclosed. Both regional governments have disclosed a lot of data on waste management (GRI 303), but still need improvements in systems, human resources and infrastructure to increase transparency and accountability

Limitations: This study only uses content analysis from official local government reports, so there are data limitations. Future research could add interviews or surveys with stakeholders to understand the challenges and opportunities in implementing sustainability report.

Contribution: This research helps understand sustainability reporting practices at the local government level, provides recommendations for improvement, and supports the achievement of sustainable development goals (SDGs).

Keywords: *Sustainability Report, GRI standards, stakeholders, local government.*

How to cite: Ruscitasari, Z., Marzuqoh, M., Mutia, G, R. (2024). Kesiapan Pelaporan Keberlanjutan Pemerintah Daerah: Kepatuhan Standar Gri di Bantul dan Sleman. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 4(1), 55-67.

1. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan telah menjadi sorotan utama dalam berbagai sektor di tingkat nasional maupun global. Pembangunan berkelanjutan kini menjadi sorotan utama dalam usaha global untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Tantangan besar seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam dan meningkatkan kesenjangan sosial memerlukan perhatian serius dari

pemangku kepentingan dalam dunia usaha. Perserikatan Bangsa-Bangsa *meluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs)* mencakup 17 tujuan untuk menghadapi berbagai tantangan global. Di Indonesia, penerapan tujuan SDGs menjadi fokus utama diberbagai faktor termasuk dalam dunia usaha. Dalam penerapan tujuan tersebut melibatkan beberapa stakeholder, dengan adanya keterlibatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan lebih efektif dan dampaknya langsung bisa dirasakan masyarakat (Rizki et al., 2022).

Pelaporan berkelanjutan (*sustainability report*) merupakan alat penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) kepada para pemangku kepentingan, ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Zuherman, 2025);(Apriliyani et al., 2021). Perusahaan dapat memanfaatkan laporan berkelanjutan sebagai strategi untuk memperkuat kepercayaan investor yang akan berdampak positif terhadap nilai perusahaan (Martania Dwi Hapsari, 2023). Dalam hal ini, *Global Reporting Initiative (GRI)* berperan sebagai standar internasional yang menyediakan panduan terstruktur serta mendorong transparansi bagi organisasi (Pratama & Soenaria, 2024), sedangkan pelaporan keberlanjutan di organisasi nirlaba berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana efektivitas organisasi dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan dan meriah tujuan yang telah ditetapkan (Alali et al., 2019).

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi internasional yang menyusun standar global tentang laporan keberlanjutan (Qisthi & Fitri, 2021). Standar GRI digunakan sebagai pedoman laporan keberlanjutan oleh organisasi di Indonesia (Wilkinson, 2022). Standar ini membantu perusahaan dan organisasi dalam mengkomunikasikan hasil yang dihasilkan dari proses bisnis. *Global Reporting Initiative (GRI)*, berperan penting dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan dan telah memberikan dukungan kepada organisasi untuk menyusun laporan yang komprehensif dan informatif (Habibah & Soenaria, 2024).

Pengungkapan mengenai aspek lingkungan dan sosial memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan perusahaan (et al., 2023). Beberapa negara maju menerapkan peraturan untuk mewajibkan perusahaan dalam mempertimbangkan aspek sosial dan dampak lingkungan dalam praktik pelaporan, tetapi akibatnya perusahaan di negara tersebut memiliki sedikit motivasi untuk melaporkan dampak lingkungan dan sosial dalam laporan perusahaan (Rashid, 2018). Perusahaan berkontribusi secara signifikan terhadap degradasi lingkungan kini menghadapi tekanan luar biasa untuk keberlanjutan perusahaan dalam mencapai tujuan pelaporan keuangan (Mondal et al., 2024). Pada penerapan pelaporan berkelanjutan di sektor pemerintahan tidaklah tanpa rintangan. Beberapa kendala yang sering muncul meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan data yang relevan dan akurat, serta rendahnya pemahaman mengenai standar pelaporan yang berlaku seperti (GRI) atau standar nasional terkait.

Pemerintah daerah berperan penting mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Laporan berkelanjutan memainkan peran penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kabupaten Bantul dan Sleman, yang merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di Yogyakarta, kini menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Tantangan ini muncul dari pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan akan pembangunan inklusif. Selain itu, Sleman dikenal sebagai daerah yang mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya, sedangkan Bantul lebih unggul di sektor agrikultur serta UMKM. Perbedaan karakteristik ini memberikan peluang untuk mengkaji penerapan laporan berkelanjutan di berbagai sektor. Selain itu, kedua kabupaten menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program-program pemerintah, seperti pengelolaan limbah dan pemberdayaan masyarakat di Bantul serta inisiatif pariwisata berkelanjutan di Sleman. Selain itu, penelitian yang terkait penerapan standar GRI di sektor pemerintahan Penelitian tentang kesesuaian dan tantangan penerapan GRI di pemerintah daerah, khususnya dalam konteks sosial dan lingkungan, masih sangat kurang. Pada umumnya, Standar GRI diterapkan oleh sektor swasta dan organisasi nirlaba, sementara penerapannya di sektor pemerintahan, khususnya di tingkat daerah, masih terbatas. Penelitian

ini bertujuan menganalisis penyajian laporan berkelanjutan di Kabupaten Bantul dan Sleman, khususnya dalam aspek sosial dan lingkungan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang terhubung pada suatu entitas, secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Teori Stakeholder memainkan peran sentral dalam membentuk paradigma baru akuntansi keberlanjutan. Teori stakeholder berpendapat bahwa seberapa besar perusahaan didirikan untuk tujuan tertentu, lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan (Schaltegger et al., 2017). Dalam teori pemangku kepentingan, Perusahaan dianggap sebagai kerangka kerjasama untuk menciptakan nilai sebagai tujuan bisnis. Entitas perlu memperhatikan tidak hanya kepentingan mereka sendiri dan pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan lain yang dapat memengaruhi atau terpengaruh oleh aktivitas bisnis (Manalu et al., 2023). Teori stakeholder menekankan bahwa organisasi harus bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan operasi organisasi tersebut. Pelaporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI adalah salah satu cara organisasi menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan. Kepentingan stakeholder dalam keberlanjutan bisnis mencakup semua pihak yang terlibat dengan tujuan menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya satu kelompok tertentu.

2.2 Sustainability Reporting

Beberapa penelitian akuntansi dengan topik sosial dan lingkungan saat ini telah banyak dikembangkan. Menurut situs www.globalreporting.org, laporan berkelanjutan adalah dokumen yang disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk menampilkan dampak yang dihasilkan dari aktivitas baik aspek ekonomi, lingkungan, serta sosial. Selain itu, laporan tersebut juga menggambarkan nilai-nilai yang dipegang, model tata kelola yang diterapkan, strategi organisasi dan tanggungjawab terhadap keberlanjutan perekonomian dunia. Beberapa jenis laporan berkelanjutan diantaranya, seperti laporan yang secara khusus berfokus pada satu dimensi keberlanjutan (misalnya laporan keuangan, laporan sosial, dan laporan lingkungan) dan laporan yang terintegrasi (Hörisch et al., 2020). Penelitian (Tirtakusuma & Mais, 2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten menyusun sustainability reporting cenderung membangun hubungan lebih baik dengan stakeholder, termasuk pemerintah yang berperan dalam menentukan kebijakan pajak. Laporan berkelanjutan merupakan salah satu sarana bagi pemerintah daerah dalam berkomunikasi secara tidak langsung dengan para stakeholder. Melalui laporan berkelanjutan, pemerintah daerah memberikan informasi terbuka dan transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban sekaligus membangun kepercayaan stakeholder.

2.3 Global Reporting Initiative (GRI)

Pedoman pelaporan berkelanjutan kini diterapkan secara luas di dunia (*Global Reporting Initiative (GRI)*, 2025). Pedoman ini mencakup prinsip, standar pengungkapan, dan panduan implementasi untuk berbagai organisasi. Salah satu standar global yang diakui adalah dari Global Reporting Initiative (GRI). GRI bertujuan mengembangkan dan menyebarkan pedoman pelaporan berkelanjutan yang dapat diterapkan secara universal, serta mendukung bisnis, pemerintah, serta organisasi lainnya dalam memahami dampak aktivitas mereka terhadap isu-isu keberlanjutan. Pengungkapan dalam pedoman GRI menyediakan standar yang dapat digunakan atau dipilih oleh Perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal pelaporan (Apriliyani et al., 2021).

Pelaporan berkelanjutan (*sustainability report*) merupakan alat penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) kepada para pemangku kepentingan, ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Zuherman, 2025). Standar GRI digunakan sebagai pedoman laporan keberlanjutan oleh organisasi di Indonesia, termasuk pemerintahan daerah (Global Reporting Initiative 1, 2023). Namun dalam penerapan pada pemerintahan daerah masih menghadapi

sejumlah tantangan (Pratama & Soenaria, 2024). Kabupaten Bantul dan Sleman, yang merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di Yogyakarta, kedua kabupaten menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program-program pemerintah, seperti pengelolaan limbah dan pemberdayaan masyarakat di Bantul serta inisiatif pariwisata berkelanjutan di Sleman.

Meskipun demikian, pada penelitian sebelumnya menunjukkan penerapan laporan berkelanjutan pada pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman mengenai standar GRI, keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi serta kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan (Habibah & Soenaria, 2024). Menurut (Pratama & Soenaria, 2024) penerapan GRI 200 serta GRI 400 dalam laporan berkelanjutan belum disajikan secara transparan. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Kabupaten Bantul dan Sleman dalam menerapkan laporan berkelanjutan dengan standar GRI serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

3. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode observasi dokumen dalam mengumpulkan informasi yang tersedia di ruang publik atau melalui website pemerintah kota. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau laporan yang dipublikasikan secara resmi. Pemilihan dokumen didasarkan terhadap indikator GRI 200 dan GRI 300.

Penelitian ini menganalisis konten dengan penilaian skor tiap item GRI yang telah diterapkan, mengacu pada penelitian sebelumnya oleh (Apriliyani et al., 2021). Teknik dokumentasi juga digunakan dengan mengandalkan data sekunder yang berasal dari informasi publik yang tersedia di situs masing-masing. Analisis dilakukan dengan membandingkan persentase kesesuaian informasi di situs web pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman dengan standar indikator GRI.

Teknik penilaian yang dilakukan yaitu analisis dengan membandingkan presentase dengan kesesuaian informasi yang terdapat pada situs web pemerintahan Kabupaten Bantul dan Sleman sesuai dengan standar indikator GRI. Penilaian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Skor 0: menunjukkan tidak adanya pengungkapan terkait item GRI-G4;
2. Skor 1: pengungkapan ada, tetapi tidak menyeluruh atau hanya sebagian item yang relevan diungkapkan;
3. Skor 2: pengungkapan dilakukan sepenuhnya, mencakup semua item yang diterapkan.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Pengungkapan Standar Khusus

Indikator dalam pengungkapan standar khusus pada laporan keberlanjutan GRI bertujuan untuk menyampaikan informasi aspek material dalam manajemen dan kinerja organisasi. Menurut GRI, aspek material merupakan elemen yang menunjukkan dampak signifikan terhadap ekonomi dan lingkungan, serta berpengaruh langsung terhadap keputusan dan evaluasi dari para stakeholder.

4.2 Pengungkapan Standar Umum

Indikator pengungkapan standar umum dalam GRI bertujuan untuk memberikan informasi dasar mengenai organisasi serta konteks operasionalnya. Beberapa elemen penting yang disampaikan meliputi:

a. Profil Organisasi

Pemerintah Kabupaten Bantul dikelola oleh Komite Nasional Daerah berdasarkan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1945. Namun, undang-undang ini baru diterapkan di Yogyakarta dan Surakarta setelah dikeluarkannya UU Pokok Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1948, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 15 Tahun 1950 yang mengatur pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia. Kantor pusat Pemerintah Bantul berada di Komplek Parasamy Jalan Robert

Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711. Jumlah kecamatan sebanyak 17 kepanewonan, 75 kalurahan dan 933 padukuhan. Luas wilayah: ±506,85 km².

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kantor pusat Pemerintah Sleman terletak di Jl Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511. Jumlah kecamatan sebanyak 17 kepanewonan. Luas wilayah: ±574,82 km².

b. Tata Kelola

Bantul menerapkan SPBE sesuai Peraturan Bupati No. 132 Tahun 2020 untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi serta pelayanan publik. Pada 2024, Bantul meraih nilai A dalam SAKIP Award, menegaskan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Struktur tata kelola Kabupaten Bantul dapat diakses pada website <https://www.bantulkab.go.id/> Struktur tata kelola Kabupaten Sleman dapat diakses pada website <https://slemankab.go.id>

c. Strategi

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditetapkan melalui analisis SWOT yang komprehensif dengan menyusun dokumen RPJMD, RPJPD, dan Renstra.

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Misi:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Hal yang sama dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, dimana dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPJPD, dan Renstra, Kabupaten Sleman juga ditetapkan strategi pembangunan yang terencana dan sistematis. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta merealisasikan potensi daerah secara berkelanjutan.

Visi: “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”.

Misi:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana.
5. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas.
6. Memperkuat budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.

Sebagai upaya dalam menentukan strategi dan kebijakan tersebut, dilakukan analisis menyeluruh mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada.

d. Keterlibatan pada Pemangku Kepentingan

Pemerintah Kabupaten Bantul secara keseluruhan, menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang efektif dan merata. Seluruh pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil, bekerja bersama-sama dalam berbagai forum perencanaan, konsultasi publik, serta implementasi program-program pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merealisasikan program kerjanya cukup banyak melibatkan pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan proses pembangunan dan pengambilan keputusan di daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari bahwa untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, sektor swasta, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil, sangat diperlukan.

e. Praktik Pelaporan

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola keuangan daerah dimulai dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran program atau kegiatan. Pengelolaan keuangan daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur pedoman teknis dalam pengelolaannya. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan dan transaksi dalam satu periode.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menerapkan hal yang sama dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Menjelang akhir tahun, Pemerintah Daerah Sleman menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD guna menyediakan informasi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, DPRD, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

4.3 Pengungkapan Standar Khusus Kategori Ekonomi

Ada empat indikator yang disampaikan dalam pengungkapan standar khusus kategori ekonomi, yaitu kinerja ekonomi, dampak ekonomi tidak langsung, keberadaan pasar, dan praktik pengadaan.

4.3.1 GRI 200 Ekonomi

Pengungkapan standar khusus kategori ekonomi mencakup 4 indikator, yaitu kinerja ekonomi, keberadaan di pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, perilaku anti persaingan dan pajak. Tingkat kesesuaian informasi yang dimiliki Kabupaten Bantul dengan indikator-indikator tersebut mencapai 41%, sedangkan Kabupaten Sleman sebesar 35%. Berikut adalah hasil temuan mengenai kesesuaian informasi dengan indikator pengungkapan standar khusus kategori ekonomi.

a. GRI 201 Kinerja Ekonomi

Tabel 1. GRI 201 Kinerja Ekonomi

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung	Ya	Ya
201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang yang muncul akibat dari perubahan iklim	Ya	Ya
201-3	Kewajiban yang terkait dengan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	N/A	N/A
201-4	Dukungan finansial yang diterima dari pemerintah	N/A	N/A

Pengungkapan GRI 201-1 oleh Pemerintah Bantul telah mencakup kinerja ekonomi yang diperoleh dan didistribusikan dengan alokasi anggaran signifikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengawasan. Sementara itu, Pemerintah Sleman menyampaikan GRI 201-1 dengan merinci kinerja ekonomi, nilai yang diperoleh, dan distribusi serta membandingkan rasio kinerja dengan tahun sebelumnya untuk memantau pertumbuhan ekonomi dan ketepatan pelaksanaan kegiatan.

Kedua pemerintah daerah, Bantul dan Sleman, juga telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko perubahan iklim. Dalam pengungkapan GRI 202-2, keduanya menangani risiko tersebut dengan mitigasi, adaptasi, dan integrasi kebijakan pengelolaan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Dalam pengungkapan GRI 201 kinerja ekonomi, Kabupaten Bantul lebih fokus pada

mendistribusikan anggaran di berbagai sektor strategis. Sementara Kabupaten Sleman mendalami dalam pemantauan pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan rasio kinerja ekonomi tahunan.

b. GRI 202 Keberadaan Pasar

Tabel 2. GRI 202 Keberadaan Pasar

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	N/A	N/A
202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	N/A	N/A

c. GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Tabel 3. GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
203-1	Investasi dalam infrastruktur dan penyediaan layanan	Ya	Ya
203-2	Dampak ekonomi yang tidak langsung signifikan	Ya	N/A

203-1 : Investasi dalam infrastruktur dan penyediaan layanan

Pemerintah Bantul menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur dan layanan publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, pembangunan infrastruktur di Sleman direncanakan untuk mendukung visi dan misi pembangunan, sebagai elemen penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

203-2 : Dampak ekonomi yang tidak langsung signifikan

Pemerintahan Bantul memuat berbagai layanan infrastruktur yang lebih maju seperti kesehatan, pendidikan transportasi dan layanan publik lainnya. Infrastruktur yang dikembangkan termasuk jalan, jembatan serta sistem air bersih. Pemerintahan Sleman berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang kokoh, mengembangkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya inovasi. Untuk pengungkapan GRI 203 Kabupaten Bantul lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kedua Kabupaten memiliki prioritas yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.

d. GRI 204 Praktik Pengadaan

Tabel 4. GRI 204 Praktik Pengadaan

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
204-1	Proporsi pengeluaran terhadap pendapatan daerah	N/A	N/A

e. GRI 205 Anti Korupsi

Tabel 5. GRI 205 Anti Korupsi

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkit korupsi	N/A	Ya
205-2	Kebijakan dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi	N/A	Ya
205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	N/A	N/A

Pemerintahan Sleman memiliki sembilan visi, salah satunya adalah Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan dapat dipercaya.

- f. GRI 206 Perilaku AntiPersaingan
Tabel 6. GRI 206 Perilaku AntiPersaingan

		Perusahaan	
GRI	Pengungkapan GRI	Bantul	Sleman
206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli	N/A	N/A

- g. GRI 207 Pajak
Tabel 7. GRI 207 Pajak

		Perusahaan	
GRI	Pengungkapan GRI	Bantul	Sleman
207-1	Pendekatan terhadap pajak	Ya	Ya
207-2	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak	Ya	N/A
207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan keperdulian yang berkaitan dengan pajak	Ya	N/A
207-4	Laporan per negara	N/A	N/A

Sistem administrasi pembayaran daerah berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya diterapkan dalam pemungutan pajak dan retribusi. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi guna memperbaiki pelayanan.

4.3.2 Pengungkapan Standar Khusus Kategori Lingkungan

Indikator dalam pengungkapan standar khusus kategori lingkungan menggambarkan pengaruh pemerintah daerah terhadap sistem alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, mencakup tanah, udara, air, dan ekosistem. Terdapat 8 indikator dalam pengungkapan tersebut, meliputi material, energi, air dan limbah, keanekaragaman hayati, emisi, sampah, kepatuhan lingkungan, dan penilaian pemasok atas lingkungan. Tingkat kesesuaian informasi yang dimiliki Kabupaten Bantul dengan indikator-indikator tersebut mencapai 38%, sedangkan Kabupaten Sleman sebesar 41%. Berikut adalah hasil temuan mengenai kesesuaian informasi dengan indikator pengungkapan standar khusus kategori ekonomi.

- a. GRI 300 Lingkungan
b. GRI 301 Material
Tabel 7. GRI 301 Material

		Perusahaan	
GRI	Pengungkapan GRI	Bantul	Sleman
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	N/A	N/A
301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	N/A	N/A
301-3	Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya	N/A	N/A

- c. GRI 302 Energy
Tabel 8. GRI 302 Energy

		Perusahaan	
GRI	Pengungkapan GRI	Bantul	Sleman
302-1	Konsumsi dalam organisasi	Ya	Ya
302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	Ya	Ya
302-3	Intensitas energi	Ya	Ya
302-4	Pengurangan konsumsi energi	Ya	Ya
302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	N/A	N/A

Kabupaten Bantul dalam menangani urusan ESDM masih memiliki keterbatasan dalam sub urusan energi baru terbarukan, dimana belum adanya izin pemanfaatan panas bumi. Hal itu tentu menjadi kendala tersendiri karena Bantul memiliki daerah yang suhu panas buminya bisa mencapai 40°C yakni di daerah Parang Wedang, Kepanewonan Kretek. Namun, hal tersebut belum memenuhi standar minimal untuk dijadikan alternatif energi yaitu minimal 90°C. Saat ini, DIY sedang berfokus membangun infrastruktur ketenaga listrikan, energi listuk hybrid dan energi baru terbarukan.

Kabupaten Sleman terdapat bahan tambang banyak ditemukan di sepanjang Sungai di kaki Gunung Merapi. Beberapa diantaranya, seperti pasir, breksi, batu apung dan andesit serta tanah liat. Ada pula batu gamping, namun karena berada di kawasan cagar alam sehingga tidak boleh ditambang. Meskipun jaringan listrik PLN sudah menjangkau sebagian besar padukuhan, masih ada rumah-rumah di daerah terpencil dan pemukiman baru yang belum terjangkau. Untuk itu, alternatifnya adalah menyediakan listrik menggunakan tenaga surya dan energi biogas. Salah satu kewenangan kabupaten dalam mengelola energi dan sumber daya mineral menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah panas bumi. Namun, Kabupaten Sleman saat ini belum memiliki potensi panas bumi.

Kabupaten Bantul memiliki potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan keseluruhan, untuk Kabupaten Sleman memiliki sumber daya tambang walaupun masih dihadapkan dengan tantangan akses listrik di beberapa wilayah. Kedua Kabupaten tersebut perlu memperkuat upaya dalam pengelolaan energi baru terbarukan agar mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan.

d. GRI 303 Air dan Limbah

Tabel 9. GRI 303 Air dan Limbah

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	Ya	Ya
303-2	Managemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	Ya	Ya
303-3	Pengambilan air	Ya	Ya
303-4	Pembuangan air	N/A	N/A
303-5	Konsumsi air	N/A	N/A

GRI 303-1

Pengelolaan Akses Air Bersih dan Kualitas Lingkungan Hidup Berdasarkan Pengungkapan GRI 303
 Dalam upaya meningkatkan akses terhadap air bersih, Pemerintah Kabupaten Bantul menambah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi SIPAS. Untuk daerah yang rawan air bersih, mendapatkan pendanaan program dari APBD dan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memastikan seluruh penduduknya memiliki akses terhadap air minum atau air bersih. Akses ini memperhatikan aspek keterjangkauan, kuantitas, dan kontinuitas, meskipun kualitas air minum masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Air bersih yang digunakan masyarakat Sleman umumnya bersumber dari sistem yang terpelihara dengan baik, seperti PDAM, SPAMDes, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan penampungan air hujan.

Dalam kaitannya dengan pengungkapan *Global Reporting Initiative* (GRI) 303-2, Indeks Kualitas Hidup Lingkungan (IKHL) terdiri dari tiga indikator utama:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, yang mencakup parameter seperti TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform.
2. Indeks Kualitas Udara (IKUD) dengan bobot 30%, yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang ditentukan berdasarkan luas tutupan lahan.

Hasil capaian IKA, IKUd, dan IKTL memberikan dampak positif terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui pengungkapan *Global Reporting Initiative* (GRI) 303-3, telah melaksanakan pemantauan kualitas air sungai pada lima sungai utama di wilayah tersebut, yaitu Sungai Winongo, Oyo, Bedog, Code, dan Gajahwong. Pemantauan dilakukan di 15 titik yang mewakili tiga wilayah aliran sungai, yakni hulu, tengah, dan hilir, serta dilaksanakan pada dua periode, yaitu musim penghujan dan kemarau. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2020, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bantul mencapai 51,8, menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tren IKA dari tahun ke tahun di Kabupaten Bantul mengindikasikan adanya perbaikan kualitas air sungai.

Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan pemantauan kualitas air secara umum dengan mengukur sejumlah parameter pada 60 titik di 11 sungai yang tersebar di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, nilai IKA Kabupaten Sleman tercatat sebesar 41,33, yang termasuk dalam kategori kurang baik. Kualitas air sungai di Sleman dipengaruhi oleh tingginya kadar *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), total coliform, deterjen, serta minyak dan lemak. Upaya peningkatan kualitas air sungai di kedua wilayah ini memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk penguatan regulasi pengelolaan limbah, edukasi masyarakat, dan peningkatan fasilitas pengolahan air limbah.

Kabupaten Bantul menunjukkan aktivasi yang lebih dalam mengenai upaya peningkatan kualitas air sungai dengan tren Indeks Kualitas Air (IKA) yang semakin membaik. Untuk Kabupaten Sleman telah mencapai kemajuan dalam hal akses terhadap air bersih, walaupun masih menghadapi beberapa tantangan mengenai kualitas air sungai. Dalam pengelolaan limbah kedua kabupaten ini perlu memperkuat dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, untuk menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

e. GRI 304 Keanekaragaman Hayati

Tabel 10. GRI 304 Keanekaragaman Hayati

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
304-1	Lokasi operasi di kawasan lindung dan bernilai keanekaragaman hayati	N/A	N/A
304-2	Dampak, aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	N/A	N/A
304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	N/A	N/A
304-4	Spesies daftar merah IUCN dan spesies konservasi nasional	N/A	N/A

f. GRI 305 Emisi

Tabel 11. GRI 305 Emisi

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	N/A	N/A
305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	N/A	N/A
305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	N/A	N/A
305-4	Intensitas Emisi GRK	N/A	N/A
305-5	Pengurangan Emisi GRK: Langkah-langkah Pengurangan Emisi	N/A	N/A
305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	N/A	N/A
305-7	Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	N/A	N/A

g. GRI 306 Sampah
Tabel 12. GRI 306 Sampah

GRI	Pengungkapan GRI	Perusahaan	
		Bantul	Sleman
306-1	Timbulan Limbah dan Dampak Signifikan: Sumber Pencemar di Sungai	Ya	Ya
306-2	Manajemen Dampak Signifikan	Ya	Ya
306-3	Timbulan Limbah	N/A	Ya
306-4	Limbah yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir	Ya	Ya
306-5	Limbah yang Dikirimkan ke Pembuangan Akhir	Ya	Ya

Berdasarkan data dari *bantulkab.go.id*, Produk limbah yang dikelola dengan baik di Kabupaten Bantul mencapai 84,83%, sementara 80% rumah Kabupaten Bantul mencatat bahwa sebesar 84,83% limbah telah dikelola dengan baik, sementara 80% rumah tangga telah memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Namun demikian, hanya 56 kalurahan yang telah menerapkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Hingga saat ini, Kabupaten Bantul juga belum memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Sistem pengelolaan air limbah di Bantul meliputi dua strategi: (1) pengembangan instalasi pengolahan air limbah di wilayah perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk Sewon dan Pleret, dan (2) pembangunan instalasi di Kapanewon Bambanglipuro.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul berperan penting dalam menangani pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kebisingan, pencemaran air, dan limbah cair. Pengaduan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu melalui inspeksi lapangan dan pengambilan sampel untuk dianalisis. Jika terbukti terdapat pencemaran, DLH memberikan rekomendasi teknis sebagai langkah penanggulangan. Sebaliknya, di Kabupaten Sleman, pengelolaan air limbah domestik difokuskan pada pencegahan pencemaran air dan tanah, dengan volume limbah mencapai 86.393,28 m³ per hari. Rendahnya kualitas air dikarenakan perilaku masyarakat dan industri yang masih membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) perlu dilakukan secara terkoordinasi, meliputi seluruh bagian sungai.

Sistem pengelolaan air limbah di Sleman menggabungkan pendekatan individu dan komunal dalam pembuangan air limbah rumah tangga. Salah satu program yang telah diterapkan adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), yang mengintegrasikan sarana pengangkutan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Prambanan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan air limbah secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Kabupaten Bantul dan Sleman menunjukkan langkah-langkah progresif dalam pengelolaan limbah. Tetapi, Kabupaten Bantul terlihat unggul dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan sistem sanitasi. Sedangkan Kabupaten Sleman telah memiliki sistem pengelolaan lumpur tinja yang lebih maju. Maka dari itu kedua Kabupaten masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan air limbah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perbaikan regulasi, pengembangan infrastruktur, dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar pengelolaan limbah dapat berlangsung dengan berkelanjutan.

- h. GRI 307 Kepatuhan Lingkungan
N/A
- i. GRI 308 Penilaian Pemasok atas Lingkungan
N/A

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kesiapan dalam pelaporan berkelanjutan pada Pemerintahan Bantul dan Sleman. Dalam menganalisis berdasarkan standar GRI 200 dan GRI 300. Pengungkapan kinerja ekonomi kedua Kabupaten telah sesuai dan menunjukkan upaya signifikan dalam menyampaikan informasi, tetapi masih ada beberapa pengungkapan standar GRI 200 yang tidak disajikan, belum menyeluruh serta penyajian yang masih sulit dipahami. Seperti pada pengungkapan GRI 202,204, 205,206 keduanya belum menyajikan informasi secara lengkap. Untuk pengungkapan GRI 300- aspek lingkungan, kedua Kabupaten sama-sama memiliki penyajian informasi lengkap terutama pada pengungkapan GRI 303- sampah. Namun demikian masih ada beberapa pengungkapan GRI 300 yang tidak disajikan secara signifikan. Pada GRI 301,304,305 belum ditemukan data atau informasi yang disampaikan pada laporan dari kedua Kabupaten tersebut.

Kontribusi penelitian terletak pada evaluasi objektif tentang sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI. Hal ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Selain itu, hasil penelitian juga memberikan wawasan berharga bagi pemerintahan daerah dalam meningkatkan penyajian laporan berkelanjutan serta memperbaiki aspek-aspek yang belum memenuhi standar pengungkapan GRI. Dalam menyusun laporan berkelanjutan, Pemerintahan Kabupaten Bantul dan Sleman masih diperlukan perbaikan dalam beberapa hal seperti sistem informasi serta penyajian informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang baik.

1. Kabupaten Bantul

- Sistem Informasi : perlu pengembangan sistem yang lebih terintegrasi mengenai data yang terkait keberlanjutan dapat diakses dengan mudah
- Penyajian informasi : struktur laporan berkelanjutan perlu disajikan dengan format yang lebih jelas

2. Kabupaten Sleman

- Sistem Informasi : optimalisasi platform untuk meningkatkan aksesibilitas informasi mengenai keberlanjutan dengan menambahkan fitur interaktif yang dapat memudahkan
- Penyajian Informasi : diperlukan standarisasi dengan format yang tepat dan konsisten

Limitasi dan studi lanjutan

Limitasi dan kelemahan penelitian ini adalah keterbatasan data karena data yang dianalisis hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan resmi pemerintahan ataupun laporan kinerja yang dimiliki. Penelitian ini hanya menggunakan analisis konten sehingga memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kualitas dalam implementasi pelaporan dan hanya fokus pada informasi yang tersedia. Untuk penelitian mendatang disarankan untuk menambah metode penelitian seperti menambah data primer dengan melakukan wawancara atau survei kepada pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam penerapan laporan berkelanjutan.

Referensi

- Alali, F., Chen, Z. (Daniel), & Liu, Y. (Laura). (2019). *Sustainability Reporting in Us Government and Not-for-profit Organizations: A Descriptive Study*.
- Apriliyani, I. B., Farwitawati, R., & Nababan, R. A. (2021). Analisis penerapan global reporting initiative (GRI) G4 pada laporan keberlanjutan perusahaan sektor pertanian. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(2), 136–145.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2025). <https://www.globalreporting.org/>
- Global Reporting Initiative 1. (2023). GRI 1 - Landasan 2021. *Globalreporting.Org*, 101, 42.
- Habibah, N., & Soenaria, S. (2024). Pengungkapan Kinerja Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 316–339.
- Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. *Journal of Cleaner Production*, 275. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2020.124097>
- Manalu, C. I. B., Manurung, M., Muda, I., & Kesuma, S. A. (2023). Implementation of stakeholder

- theory in sustainability accounting: a literature review. *Brazilian Journal of Development*, 9(12), 31853–31871. <https://doi.org/10.34117/bjdv9n12-087>
- Martania Dwi Hapsari. (2023). Analisis Penerapan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntansi* 45, 4(1), 65–72. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.724>
- Mondal, M. S. A., Akter, N., Moni, S. J., & Polas, M. R. H. (2024). Financial and non-financial disclosures on sustainable development: The mediating role of environmental accounting disclosure practices. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(3), 387–406. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v5i3.1702>
- Mondal, M. S. A., Akter, N., & Polas, M. R. H. (2023). Factors influencing the environmental accounting disclosure practices for sustainable development: A systematic literature review. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(2), 195–213. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v5i2.1365>
- Pratama, J. H., & Soenaria, S. R. (2024). *Pengungkapan Kinerja Sosial pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung) Syaiful Rahman Soenaria Organisasi internasional independen Global Rep.* 3(3).
- Qisthi, F., & Fitri, M. (2021). Pengaruh Keterlibatan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Global Reporting Initiative (Gri) G4. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 469–484. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16042>
- Rashid, A. (2018). The influence of corporate governance practices on corporate social responsibility reporting. In *Social Responsibility Journal* (Vol. 14, Issue 1). <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0080>
- Rizki, K., Sood, M., & Husni, V. (2022). Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 59–80. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1944>
- Schaltegger, S., Hörisch, J., & Freeman, R. E. (2017). *Business Cases for Sustainability: A Stakeholder Theory Perspective*. 32(3), 191–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1086026617722882>
- Tirtakusuma, A., & Mais, R. G. (2025). Sustainability Reporting Dan Kewajiban Pajak : Peran Standar Gri Dan Sasb Pada Perusahaan Indonesia Melalui Pendekatan Literatur Review. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(4), 951–960.
- Wilkinson. (2022). Analisis Pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGS) PT. Gas Negara Tbk. Tahun 2016-2020 Berdasarkan Standar Global Reporting Initiative (GRI). *DiPonogoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–15.
- Zuherman, N. H. (2025). *Peran Akuntansi Lingkungan dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur*. 2(1), 433–443.